

Implementasi Program Ketahanan Pangan Dalam Upaya Pemenuhan Lumbung Pangan Desa Berkelanjutan di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo

Oleh :

Civica Silmi

Dosen Pembimbing :

Isna Fitria Agustina, M.Si

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2025

PENDAHULUAN

❑ LATAR BELAKANG

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara agraris dengan populasi yang terus meningkat. Tantangan dalam menjaga ketersediaan pangan yang merata, stabil, dan berkelanjutan menuntut keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, terutama desa sebagai pusat produksi pangan. Oleh karena itu, lumbung pangan desa menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional.

Kebijakan nasional melalui Keputusan Menteri Desa Nomor 82 Tahun 2022 dan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 mendorong penguatan program ketahanan pangan di tingkat desa, termasuk pengalokasian dana desa minimal 20% untuk ketahanan pangan. Namun, dalam praktiknya, desa seperti Jumputrejo mengalami tantangan serius dalam pelaksanaan program ini, termasuk minimnya hasil panen serta ketergantungan pada pasokan pangan dari luar.

Desa Jumputrejo meskipun mendapat peningkatan anggaran untuk program ketahanan pangan pada tahun 2024, tetap mengalami stagnasi produksi pertanian. Sub-program yang dijalankan seperti budidaya padi, melon, perikanan, dan peternakan, belum menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas implementasi program di desa tersebut.

Penelitian ini penting untuk menganalisis implementasi program ketahanan pangan di Desa Jumputrejo dengan menggunakan Model Grindle (1980), yang menekankan isi dan konteks kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dijalankan secara efektif, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat ketahanan pangan desa secara berkelanjutan.

Tabel Anggaran Desa Dalam Program Ketahanan Pangan Tahun 2023-2024

2023					
Pelatihan	Bibit	Perlengkapan Kolam	Tenaga Kerja	Sewa Alat Berat	Lainnya
66.996.600	50.000.000	47.054.000	20.000.000	15.000.000	600.000
2024					
Padat Karya	Bibit Sapi dan Ikan	Hidroponik	Peternakan dan Perikanan	Pelatihan	
88.750.000	92.171.200	45.000.000	50.000.000	36.400.000	

Sumber: Pemerintah Desa Jumputrejo, 2025 (Data Diolah)

Tabel Luas Lahan dan Bibit Program Ketahanan Pangan Desa Jumputrejo Tahun 2024

Sub program ketahanan pangan	Komoditas	Luas lahan / jumlah bibit
Pertanian	Padi	117 Ha / 1,8 ton
Perkebunan	Melon	300 m ² / 312 bibit
Peternakan	Sapi	2 ekor sapi
Perikanan	Ikan nila	1500 bibit

Sumber: Pemerintah Desa Jumputrejo, 2025 (Data Diolah)

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program ketahanan pangan di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan Model Implementasi Kebijakan Grindle (1980).

PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fernanda dan Agustina (2024) dengan judul “Penanganan Stunting di Tingkat Desa: Perlunya Pengembangan Kegiatan yang Tepat dari Dana Desa”.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hartati, Yahya, dan Sutrisno (2024) dengan judul “Implementasi Program Ketahanan Pangan Dalam Bidang Pertanian di Desa Mayang Sari ”.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2023) yang berjudul “Implementasi Kebijakan SDGs oleh Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Pandak, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas) ”.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sajidin, Antuli, dan Sareong (2022) yang berjudul “Implementasi Program Ketahanan Pangan Sebagai Upaya Pengendalian Inflasi Tingkat Desa di Kabupaten Bogor”.

METODE

Jenis Penelitian	➡	Kualitatif Deskriptif (Bogdan & Biklen, 1998)
Teknik Penentuan Informan	➡	Teknik Purposive Sampling
Informan	➡	kepala desa, kelompok agribisnis, dan masyarakat yang terlibat.
Teknik Pengumpulan Data	➡	Wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen terkait
Teknik Analisis Data	➡	Miles dan Huberman (2014) : <ol style="list-style-type: none">1. Pengumpulan data2. Reduksi data3. Penyajian data4. penarikan kesimpulan untuk memperoleh temuan yang relevan

METODE

Teori Penelitian



Model Implementasi Kebijakan Grindle (1980) digunakan untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Desa Jumputrejo, dengan 2 indikator, yaitu: 1.) ***content*** (isi kebijakan) yang melibatkan faktor internal seperti kepentingan, manfaat, dan sumber daya, 2.) ***context*** (konteks kebijakan) yang mencakup faktor eksternal seperti kekuatan aktor dan dukungan institusi .

Lokasi Penelitian



Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono
Kabupaten Sidoarjo

Hasil

Untuk mengetahui, implementasi program ketahanan pangan di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo penulis menggunakan dua indikator Implementasi menurut Grindle (1980) 1) *content* (isi kebijakan , 2) *context* (konteks kebijakan) .

1. Content

Interest Affected

Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana kepentingan masyarakat sebagai kelompok sasaran terakomodasi dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Desa Jumputrejo, berbagai sektor agribisnis seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan telah menjadi perhatian dalam program ketahanan pangan. Namun, dalam implementasinya, muncul ketimpangan dalam alokasi perhatian terhadap sektor-sektor tersebut. Petani, sebagai pelaku dominan dalam ketahanan pangan, merasa kurang diakomodasi dibanding sektor lainnya. Keterbatasan dalam pengadaan sarana produksi, pengairan yang tidak merata, hingga pemilihan penerima bantuan yang tidak sesuai bidang, menjadi indikasi bahwa kepentingan utama belum sepenuhnya menjadi prioritas.

Hal ini diperkuat dengan testimoni salah satu pengurus GAPOKTAN yang juga merupakan bendahara kelompok tani, Pak Sunyoto, yang menyatakan bahwa pembahasan anggaran dana desa sering kali tidak memperhatikan urgensi sektor pertanian, justru lebih banyak mengarah ke program baru seperti perikanan dan perkebunan. Ketika petani menghadapi kendala teknis seperti irigasi, respon dari pemerintah desa belum memuaskan.

Hasil

Hal ini diungkapkan oleh Bendahara GAPOKTAN pada wawancara

"Waktu diajak musyawarah dana desa, saya menyampaikan soal irigasi yang nggak merata dan kebutuhan alat pertanian seperti pompa air. Tapi kenyataannya, pembahasan lebih fokus ke perikanan dan perkebunan. Padahal di sini, mayoritasarganya itu petani. Bantuan juga sering nggak nyasar ke yang butuh. Kadang yang aktif malah nggak kebagian."

Type of Benefits

Manfaat program ketahanan pangan di Desa Jumputrejo sebenarnya telah dirasakan oleh sebagian masyarakat, seperti pelaku perkebunan melon yang kini menjadi pemasok untuk beberapa mitra. Namun, manfaat tersebut belum merata dan belum menyentuh lapisan masyarakat petani kecil secara optimal. Program pelatihan, alat, maupun bantuan pertanian masih terbatas dan tidak seluruhnya dirancang untuk meningkatkan produksi atau kapasitas petani lokal.

Kebijakan seperti sistem bagi hasil dalam peternakan menunjukkan potensi keuntungan jangka panjang. Namun dalam sektor pertanian, manfaat tersebut belum signifikan karena kendala akses pada sarana produksi dan dukungan teknis. Bahkan kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) justru diberikan kepada kelompok yang tidak aktif di sektor pertanian.

Hal ini diungkapkan oleh Bendahara GAPOKTAN pada wawancara

"Bimtek malah diberikan ke karang taruna, padahal mereka itu nggak terjun langsung ke sawah. Kami petani nggak dikasih kesempatan belajar. Padahal kalau ada pelatihan teknologi pertanian, kita siap belajar dan pakai. Manfaat program ya ada, tapi belum merata."

Hasil

Extent of Change Envisioned

Program ini secara ideal bertujuan untuk melakukan transformasi ketahanan pangan desa, dari sekadar produksi skala kecil menjadi sistem agribisnis berkelanjutan yang berbasis potensi lokal. Namun, perubahan besar ini belum diiringi kesiapan sumber daya manusia maupun infrastruktur yang memadai. Adopsi teknologi baru seperti hidroponik memang telah diperkenalkan, namun penerapannya masih terbatas pada kelompok tertentu saja.

Banyak petani merasa bahwa perubahan yang ditawarkan terlalu cepat tanpa pendampingan memadai. Belum ada sistem manajemen agribisnis terpadu yang memperkuat mata rantai dari produksi hingga distribusi. Maka, meskipun arah perubahan jelas dan progresif, kesiapan masyarakat masih belum setara dengan harapan kebijakan.

Hal ini diungkapkan oleh ketua umum GAPOKTAN pada wawancara

"Kalau dilihat, desa kita ini sudah mulai maju, apalagi ada hidroponik dan perikanan. Tapi untuk pertanian, petani belum siap kalau langsung disuruh ubah sistem. Harusnya ada pelatihan dulu. Perubahan itu bagus, tapi harus pelan-pelan dan sesuai dengan kondisi kita di lapangan."

•

Hasil

Site of Decision Making

Pengambilan keputusan dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Jumputrejo sebagian besar dilakukan oleh pihak pemerintah desa. Ini menunjukkan desentralisasi pengelolaan cukup dominan. Namun demikian, partisipasi masyarakat atau kelompok tani masih sebatas formalitas dalam forum musyawarah desa. Banyak keputusan strategis yang diambil tanpa mempertimbangkan urgensi teknis dari pelaku lapangan.

Meskipun struktur GAPOKTAN sudah terbentuk hingga level dusun, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan tidak maksimal. Dalam praktiknya, usulan kelompok tani sering kali tidak menjadi prioritas karena pemerintah desa sudah menetapkan fokus anggaran sesuai kebijakan pusat atau kecenderungan sektoral yang baru berkembang.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris GAPOKTAN pada wawancara

"Kadang kita diminta datang rapat, kasih usulan. Tapi pas penentuan anggaran, keputusan sudah ada. Kayak cuma dimintai pendapat aja, tapi hasilnya nggak dipakai. Contohnya, kita usul irigasi dan alat pertanian, malah yang dibiayai kebun melon."

Hasil

Program Implementors

Para pelaksana program di lapangan terdiri dari perangkat desa dan kelompok agribisnis seperti GAPOKTAN. GAPOKTAN sudah memiliki struktur yang jelas dan tersebar di setiap dusun. Namun, tantangan utama muncul dari rendahnya inisiatif dan eksekusi anggota kelompok tani dalam merealisasikan program. Banyak yang hadir dalam rapat, namun kurang aktif saat eksekusi program berlangsung.

Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan komitmen implementor melalui pelatihan atau pendampingan berkelanjutan. Kelemahan implementor bukan hanya dalam hal pengetahuan teknis, tetapi juga dalam perencanaan strategis dan koordinasi lintas sektor.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tani Makmur 3 pada wawancara

"Kita sudah sering rapat dan diajak diskusi, tapi begitu program jalan, banyak yang malas. Cuma iya-iya pas rapat. Saya pikir, ini karena kurangnya pembinaan langsung. Harusnya ada pendamping dari luar atau bimtek rutin."

Hasil

Resources Committed

Ketersediaan sumber daya, baik finansial, teknis, maupun infrastruktur, menjadi masalah krusial dalam implementasi program ini. Dana desa memang digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan, namun belum mencukupi kebutuhan lapangan yang besar. Bantuan bibit dan pupuk yang disalurkan sering kali terbatas, sehingga alokasi harus dibagi rata tanpa mempertimbangkan skala usaha tani.

Selain itu, pengadaan alat pertanian membutuhkan proses administratif yang panjang dan melelahkan bagi petani. Ketika petani membutuhkan pompa air, mereka harus mengajukan proposal dan menunggu kepastian yang tidak kunjung datang.

Hal ini diungkapkan oleh ketua Tani Makmur 5 pada wawancara

"Dikasih bantuan bibit, tapi jumlahnya dibatasi, nggak sesuai lahan yang kita kelola. Trus kalau mau minta alat kayak pompa air, harus bikin proposal dulu. Prosesnya lama, dan kadang nggak jelas kapan realisasinya. Padahal kita butuh cepat."

Hasil

2. context

Power, Interests, and Strategies of Actors Involved

Dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Jumputrejo, relasi kekuasaan dan strategi antar aktor sangat memengaruhi jalannya kebijakan. Pemerintah desa memiliki otoritas penuh sebagai aktor utama dalam distribusi bantuan dan pengambilan keputusan, sementara kelompok tani dan pelaku agribisnis lainnya berada pada posisi penerima kebijakan dengan daya tawar terbatas.

Ketimpangan kekuasaan ini menghasilkan situasi di mana keputusan program tidak selalu mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat agraris. Misalnya, kelompok tani yang lebih aktif dan membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkan prioritas, sedangkan penerima bantuan sering kali tidak memiliki ketertarikan atau kapabilitas dalam bidang pertanian. Bahkan, muncul fenomena provokatif di kalangan petani yang menyebarkan sikap apatis terhadap program dengan anggapan bahwa bantuan akan tetap turun tanpa usaha berarti. Ini menunjukkan lemahnya kontrol sosial dan rendahnya strategi advokasi dari pihak kelompok tani sendiri.

Hal ini diungkapkan oleh ketua GAPOKTAN sektor perikanan pada wawancara

"Kadang ada petani yang bilang 'halah nggak usah ngurus, nanti juga dapat bantuan lagi'. Nah, ini bikin semangat petani lain turun. Terus, ada juga bantuan yang nggak tepat sasaran. Harusnya yang nerima itu yang bener-bener kerja di lahan, tapi malah yang nggak aktif dapat alat."

Hal ini didukung oleh pernyataan ketua umum GAPOKTAN pada wawancara

"Kami di GAPOKTAN sudah berusaha mengusulkan kebutuhan petani, tapi kadang kalah sama kepentingan lain. Keputusan tetap di tangan desa. Kita nggak bisa ngotot, soalnya proses musdes juga kadang cuma formalitas aja."

Hasil

Institution and Regime Characteristics

Karakteristik kelembagaan yang berkembang di Desa Jumputrejo cukup kompleks. Di satu sisi, kelembagaan GAPOKTAN telah terbentuk hingga tingkat dusun dan memiliki struktur yang jelas, menunjukkan kesiapan kelembagaan formal. Namun di sisi lain, koordinasi antar lembaga desa, kelompok tani, dan pelaku agribisnis masih belum sinergis. Kebijakan cenderung sektoral dan tidak dirancang sebagai sistem yang integratif antar sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.

Regulasi yang mengatur penggunaan dana desa juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak perangkat desa yang lebih memilih menjalankan program-program baru yang dianggap inovatif dan "menarik perhatian", ketimbang memperkuat pondasi utama seperti infrastruktur irigasi atau penguatan produktivitas petani. Di sisi lain, kelompok tani belum memiliki kekuatan institusional yang cukup untuk menekan atau menyeimbangkan dominasi pemerintah desa dalam hal kebijakan.

Hal ini diungkapkan oleh ketua GAPOKTAN sektor perkebunan pada wawancara

"Memang kelembagaan kita sudah bagus, tapi masih berjalan sendiri-sendiri. Kadang kelompok tani nggak tahu program perikanan, begitu juga sebaliknya. Kita butuh sistem koordinasi biar semua sektor bisa jalan bareng."

Hal ini didukung oleh pernyataan sekretaris GAPOKTAN pada wawancara

"Kalau dari aturan desa sih jelas, tapi dalam praktiknya, koordinasi masih lemah. Kadang kita baru tahu ada program baru pas sudah jalan. Jadi ya agak susah menyelaraskan antar kelompok."

Hasil

Compliance and Responsiveness

Kepatuhan masyarakat terhadap program ketahanan pangan cukup beragam. Masyarakat pada dasarnya antusias menerima bantuan, namun tingkat respons dan keterlibatan aktif dalam program masih rendah. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain proses birokrasi yang rumit, minimnya pendampingan teknis, serta kurangnya kejelasan hasil jangka pendek dari program yang dijalankan.

Misalnya, dalam kasus perikanan dan perkebunan, masyarakat menerima bantuan alat dan pelatihan, namun pelaksanaannya masih terbatas. Banyak petani atau pelaku usaha agribisnis yang hadir dalam pelatihan hanya sekadar memenuhi kewajiban formal, bukan karena niat untuk mengembangkan usaha. Sementara dalam sektor peternakan, walau kebijakan desa dianggap mendukung, namun keterlibatan masyarakat masih terbatas pada kegiatan tahunan seperti penjualan sapi saat Idul Adha. Belum ada sistem insentif atau evaluasi untuk memastikan keberlanjutan program.

Hal ini diungkapkan oleh ketua GAPOKTAN sektor peternakan pada wawancara

"Desa memang mendukung program peternakan. Tapi karena sistemnya jual beli saat Idul Adha, ya masyarakat cuma fokus di momen itu aja. Belum ada rencana jangka panjang untuk pembibitan. Pakan juga ditanggung sendiri, jadi banyak yang mikir dua kali."

Hal ini didukung oleh pernyataan ketua Tani Makmur 2 pada wawancara

"Saya lihat masyarakat itu mau sebenarnya, tapi kadang ribet. Mau minta alat harus proposal, prosesnya lama. Trus kadang kalau udah dapet, nggak tahu cara pakainya. Harusnya ada pendampingan terus."

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Jumputrejo menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah mencakup berbagai sektor agribisnis, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, hasil yang dicapai belum optimal. Kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala terkait dengan kurangnya alokasi sumber daya yang memadai, kesulitan dalam distribusi bantuan, dan terbatasnya pelatihan untuk para pelaku agribisnis. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih minim, dan birokrasi yang rumit menghambat kelancaran pelaksanaan program. Oleh karena itu, meskipun ada potensi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan pangan, program ini masih membutuhkan penguatan dalam aspek perencanaan, dukungan sumber daya, dan keterlibatan masyarakat agar dapat mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas Program Ketahanan Pangan, disarankan agar pemerintah desa memperbaiki mekanisme perencanaan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, khususnya kelompok tani, dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi program. Selain itu, program ini harus didukung dengan peningkatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan di lapangan, serta simplifikasi prosedur birokrasi agar akses terhadap bantuan lebih mudah. Pengalokasian dana juga perlu diperhatikan agar lebih fokus pada kebutuhan prioritas sektor pertanian, dengan menyediakan dukungan teknis dan alat pertanian yang memadai. Pengembangan sinergi antara sektor agribisnis dan lembaga desa serta penyusunan strategi pengembangan jangka panjang juga sangat diperlukan untuk menciptakan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan.

TERIMA KASIH